

BAB I

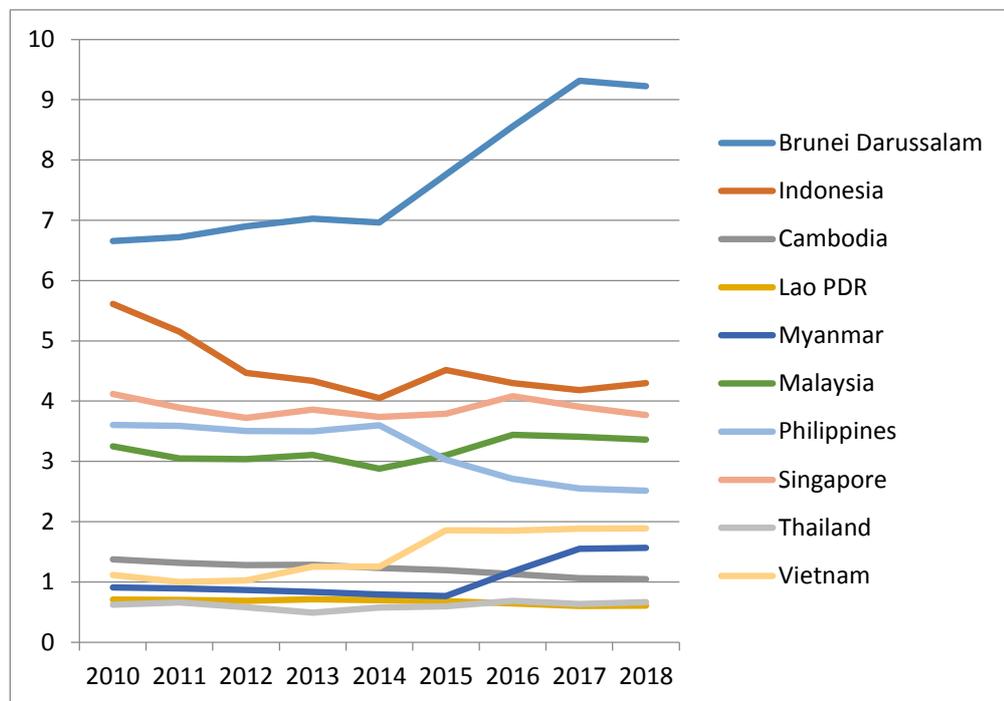
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, hal ini ditandai dengan peningkatan kembali Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2015 setelah penurunan terus menerus yang dialami sejak tahun 2012. Kondisi baik tersebut tidak dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan aspek perekonomian Indonesia dalam keadaan yang membaik, salah satunya contoh nyata yang masih sangat terlihat bahwa terdapat aspek yang masih harus dijadikan perhatian pada pembangunan negara adalah pada aspek pengangguran. Hingga saat ini, topik pengangguran masih menjadi bahan yang menarik sebagai topik perbincangan atau diskusi publik.

Hamdani (2019) melaporkan dalam Detik Finance, bahwa dalam kemajuan industri 4.0 dimana semua kegiatan perekonomian mulai dijalankan secara digital dan seluruh tenaga kerja akan dibebankan dengan persaingan yang berat dengan para robot, pengangguran di Indonesia berada pada kondisi tinggi bahkan untuk lulusan sarjana, dan hal inipun menjadi ancaman kepada pemerintah sebagai pencari solusi atas permasalahan tersebut. Bahkan laporan yang tercantum pada CNN Indonesia (2018) menyatakan bahwa pengurangan persentase pengangguran yang tercatat pada Badan Pusat Statistik tidak dapat

semata-mata digeneralisasikan, karena jika dikategorikan dengan pembagian desa dan kota, persentase pengangguran di desa meningkat walau persentasi di kota menurun, sehingga dinyatakan bahwa tidak adanya keseimbangan untuk masyarakat di desa. Bukti yang lebih besar dapat dilihat pada ratio pengangguran terhadap angkatan kerja Indonesia yang disandingkan dengan persentase ratio pengangguran terhadap angkatan kerja di 9 Negara ASEAN lainnya:



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (Diolah Penulis)

Gambar 1 Ratio Pengangguran terhadap Angkatan Kerja di 10 Negara ASEAN

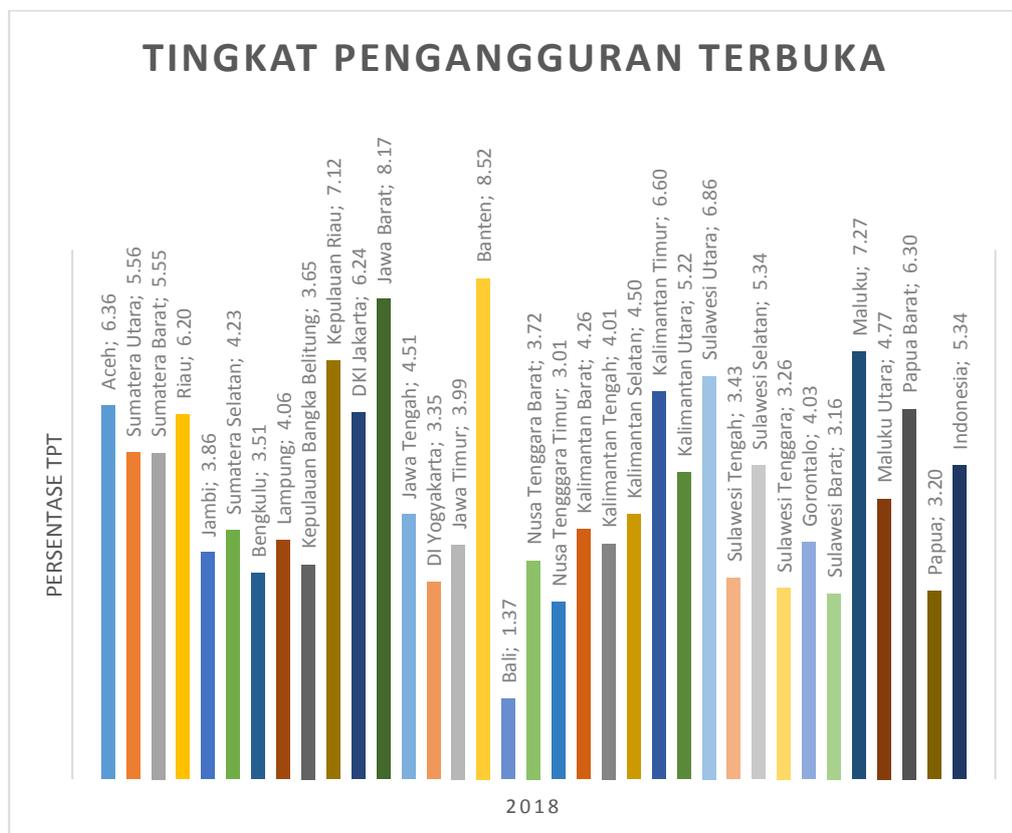
Gambar 1 menunjukkan sebuah perbandingan ratio pengangguran terhadap angkatan kerja di 10 Negara ASEAN, persentase pengangguran terhadap angkatan kerja Indonesia terlihat menduduki persentase ke-2 terbesar setelah Brunei Darussalam, mengingat populasi Indonesia yang sangat besar, hal ini menjadikan Indonesia memiliki populasi terbanyak

pertama atas pengangguran dalam secara kuantitas jumlah. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan hingga beberapa kali, kondisi ini tetaplah menggambarkan sebuah kondisi yang harus diberikan perhatian lebih dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Pengangguran merupakan salah satu acuan yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat besarnya angka pengangguran. Hal ini dibuktikan oleh Soylu, Çakmak, & Okur (2018) serta Michael, Emeka and Emmanuel (2016) bahwa pengangguran memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara negatif, sehingga meningkatnya pengangguran dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan penjabaran berikut terlihat jika pertumbuhan ekonomi pada negara Indonesia masih berada dalam ancaman akan aspek pengangguran yang masih harus diperhatikan kembali dalam upaya menurunkan persentase tingkat pengangguran yang ada terutama para lulusan sarjana yang terbentuk dalam tujuan dapat menjadi pekerja dengan kualitas yang lebih baik dan siap berpartisipasi dalam dunia kerja.

Pengangguran dapat dikatakan sebagai permasalahan yang kompleks karena dapat memberikan serta menerima pengaruh dari faktor-faktor lainnya. Besarnya angka pengangguran menggambarkan besarnya tingkat kesejahteraan rakyat dari pembangunan ekonomi. Jika pengangguran tersebut dibiarkan akan besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial, serta memiliki potensi meningkatnya kemiskinan (Linggi dan Wiwoho, 2016). Selain itu, tingkat pengangguran juga dapat memunculkan terjadinya kejahatan, wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi rentan dengan

kejahatan demi memenuhi kebutuhan (Chang and Wu, 2012). Menurut data Badan Pusat Statistik (2019) Presentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indoensia pada tahun 2018 mencapai angka 5,34% dengan kurang lebih 7 juta jiwa dalam jumlah. Grafik berikut ini, menyajikan pembagian presentase tingkat pengangguran terbuka tersebut dalam provinsi di Indonesia pada tahun 2018:



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (Diolah Penulis)

Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018

Gambar 2 terlihat bahwa terdapat 12 provinsi dengan persentase yang melebihi persentase tingkat pengangguran terbuka se-Indonesia yang secara urut adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau, Sulawesi

Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Papua Barat, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi didominasi oleh provinsi-provinsi besar, salah satunya adalah Ibukota negara dengan persentase sebesar 6,24%. Jika melihat dari sudut pandang lain, yaitu kepadatan penduduk, Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk yang tinggi memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi yang digambarkan dengan kondisi Provinsi Banten dan Jawa Barat yang memiliki persentase tertinggi pertama dan kedua pada tahun 2018 tersebut.

Mengingat target yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk tahun 2020 mengenai target pembangunan yang salah satunya adalah menargetkan persentase tingkat pengangguran terbuka berada sekitar 4,8 - 5,1 persen (Sidik, 2019). Selain itu, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mahatmi Parwitasari Saronto juga menargetkan tingkat pengangguran pada 2019 ini dapat turun kembali dengan menargetkan hingga 4,8 persen (Putra, 2019). Melihat kondisi tersebut, permasalahan pengangguran ini masih menjadi satu faktor dari banyak faktor yang mempengaruhi yang perlu berikan perhatian dalam meraih apa yang diinginkan negara untuk Indonesia yang lebih baik.

Menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP) diterapkan. UMP merupakan hak yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja dalam sejumlah uang yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Penerapan UMP ditetapkan atas perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) oleh pemerintah sebagai jumlah pendapatan

miminal yang layak diterima oleh tenaga kerja. Menurut Isnayanti, dan Ritonga (2017) memang upah memiliki pengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran dan menjadi satu faktor dari banyak faktor yang mempengaruhi.

Upah sangatlah berperan penting bagi para perkerja yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pribadi maupun keluarga untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun bagi sebuah perusahaan kenaikan tingkat upah dapat menyebabkan meningkatnya biaya yang harus dibayarkan. Hal tersebut memberikan sebuah pengaruh kepada tingginya biaya dimana kemudian bersebab-akibat terhadap berkurangnya barang atau jasa yang diminta, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang dan secara tidak langsung meningkatkan jumlah pengangguran (Kim and Lim, 2018; Meer and West, 2012).

Menggunakan sudut pandang lain, pendidikan dapat dikatakan dan dinyatakan dengan tegas sebagai faktor yang memiliki pengaruh terbesar dalam pengembangan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia yang bisa dikatakan penting, kondisi ini dapat menjadi sebuah investasi dalam penyediaan dan persiapan atas tenaga kerja sehingga kondisi ini sangat diharapkan dan menjadi solusi untuk dapat memenuhi kesempatan dalam pasar tenaga kerja dengan kualitas sumber daya yang baik. Menurut Hartanto dan Masjkuri (2017) jika pendidikan seseorang yang dimiliki sudah cukup atau bahkan tinggi, dapat dikatakan bahwa kemampuan yang dimiliki juga tentunya sudah terlatih dan secara tidak langsung kesempatan untuk dapat memiliki pekerjaan yang dimilikinya juga akan tinggi. Hal tersebut didasarkan

pada penciptaan kemampuan yang bermacam-macam hingga dapat meningkatkan peluang kerja yang nantinya akan mengurangi masalah pada tingkat pengangguran.

Pendidikan dalam sudut pandang lain juga dimaksudkan sebagai sarana yang diupayakan untuk menciptakan sebuah peningkatan dalam kesejahteraan dengan upaya pemanfaatan peluang yang ada dalam mendapatkan pekerjaan, semakin tinggi pendidikan yang diterima oleh seorang individu dapat disimpulkan secara tidak langsung memberikan sebuah dampak terhadap kemampuan dalam memproduksi atau yang biasa disebut dengan *skill* yang dimiliki seorang individu dalam bekerja. Selain itu, pendidikan juga memiliki pengaruh yang penting untuk perekonomian (Budiarti dan Seosatyo, 2014). Peningkatan atas kemampuan atau dapat juga disebut dengan kualitas yang dimiliki oleh setiap individu sebagai sumber daya manusia dalam hal ini sangat diharapkan secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran yang ada. Umumnya untuk bekerja di tempat yang memiliki status atau derajat yang dinilai diatas rata-rata tentunya dibutuhkan berkualitas serta profesionalitas agar sumber daya yang dipekerjakan tersebut dapat dipastikan mampu untuk menjalankan tugas yang dimilikinya dalam bekerja secara efektif serta efisien.

Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), menggambarkan jenjang pendidikan yang wajib ditempuh oleh masyarakat yaitu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang harus ditempuh dalam jangka waktu hingga enam tahun, yang dilanjutkan dengan

mengampuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ditempuh dalam jangka waktu hingga tiga tahun, dan yang terakhir namun bukan menjadi akhir dalam jenjang pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana jenjang ini dapat ditempuh dalam jangka waktu hingga tiga tahun atau bahkan lebih yang disesuaikan dengan program pendidikan yang diampuh. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri sebelum akhirnya memasuki fase kedewasaan yang mensyaratkan kemandirian dengan kemampuan akademik yang cukup.

Menarik kesimpulan atas pemaparan yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki ketertarikan dalam menjalankan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Rata-rata Lama Sekolah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”** dengan periode waktu 6 tahun yaitu 2013-2018.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
- c. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?

- d. Bagaimanakah pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka pada negara Indonesia.
- b. Untuk melihat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka pada negara Indonesia.
- c. Untuk melihat pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- d. Untuk melihat pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka pada negara Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dan diharapkan oleh peneliti atas terjalankan penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Menguatkan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan bisa menjadikan perluasan wawasan untuk menentukan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi tingkat pengangguran terbuka serta menambah wawasan serta referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.